

PENDIDIKAN TINGGI DAN MASALAH PENGANGGURAN DALAM MENGARUNGI ERA EKONOMI GLOBAL

Zainal Mardi**

Abstrak

Sejak mulai memasuki era ekonomi global perkembangan pendidikan tinggi semakin mendapatkan perhatian. Sejak saat itu konsep yang berorientasi pada “Keunggulan Komparatif” sudah harus berganti dengan konsep “Keunggulan Kompetitif”. Kunci keberhasilan suatu negara dalam era ekonomi global menjadi sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusianya. Dimilikinya masyarakat yang berdisiplin, dengan etos kerja tinggi, dan berketerampilan akan menjamin diperolehnya kemenangan kompetisi menghadapi negara lain. Berdisiplin dengan etos kerja tinggi yang berarti taat asas pada pengetahuan dan berketerampilan tinggi adalah buah yang mestinya dihasilkan melalui pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi harus menjalankan pendidikan tinggi dengan ketiga dharmanya secara utuh : yaitu Pendidikan – Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan tinggi akan mampu mengurangi masalah ketenagakerjaan yang akan dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan pola pikir itu, jika pengangguran terus meningkat sejalan dengan berkembangnya perguruan tinggi., tentu hal ini menarik untuk dikaji. Perguruan Tinggi Swasta telah berkembang pesat melengkapi Perguruan Tinggi Negeri. Pemerintah berpraktika untuk menempatkan PTS setara dengan PTN. Akan tetapi di dalam perkembangannya, banyak lahir kebijakan yang telah menciptakan iklim yang tidak kondusif sehingga persaingan tidak sehat merusak prakarsa kesetaraan. Aura bisnis terasa merasuki tubuh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi seolah menjadi pemicu lahirnya pencari kerja.. Kecemasan bertambah besar karena pengangguran tenaga terdidik berkolerasi positif dengan maraknya perguruan tinggi. Di dalam masyarakat, perguruan tinggi, industri dan pemerintah adalah tiga pelaku yang bisa membangun sinergi dengan baik. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan tinggi adalah penghasil faktor produksi terutama tenaga kerja yang akan digunakan oleh industri. Sebaliknya industri yang menjalankan fungsi produksi barang dan jasa adalah pengguna hasil pendidikan tinggi dari perguruan tinggi.

** Zainal Mardi, SE., adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

Keterkaitan harus terjalin dan ini tentu saja direkat oleh sistem dengan pemerintah selaku perekat yang menciptakan iklim kondusif terhadapnya. Jika ini terwujud, perkembangan pendidikan tinggi akan bisa mengurangi pengangguran. Semoga.

Kata kunci : Tri Dharma, Keunggulan Kompetitif, Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Pendahuluan

Pendidikan tinggi dan kinerja perguruannya kembali menjadi sorotan masyarakat. Berubahnya paradigma sejak mulai memasuki era ekonomi global adalah salah satu alasannya karena sejak memasuki era ekonomi global, konsep yang berorientasi pada “Keunggulan Komparatif” pada saat ini harus ditanggalkan dan sudah harus berubah menjadi konsep “Keunggulan Kompetitif”. Kekayaan akan sumberdaya alam bukan lagi hal utama yang bisa dibangga-banggakan dalam menghadapi era ekonomi global. Kunci keberhasilan suatu negara dalam era ekonomi global menjadi sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusianya dan kualitas sumberdaya manusia ini sangat dipengaruhi oleh kinerja perguruan tinggi.

Negara akan menuai keberhasilan jika dalam era ekonomi global telah mempersiapkan diri dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia secara lebih baik. Kemajuan suatu bangsa akhirnya lebih ditentukan oleh keunggulan sumberdaya manusia ketimbang oleh pemilikan sumberdaya alamnya. Dimilikinya masyarakat yang berdisiplin, dengan etos kerja tinggi, dan berketerampilan akan menjamin diperolehnya kemenangan kompetisi menghadapi negara lain. Paling tidak, dengan dimilikinya sumberdaya manusia bermental masyarakat industrial, secara keseluruhan bangsa di negara tersebut akan mampu ke luar dari perangkap keterbelakangannya (*under development trap*) dan bisa memasuki tahap tinggal landas (*Take off*). Guna menghasilkan masyarakat industrial inilah pendidikan tinggi dikembangkan di suatu negara.

Sebagai lembaga yang bertanggung-jawab untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi ke tengah masyarakat, Perguruan Tinggi harus menjalankan ketiga dharma secara utuh : yaitu : Pendidikan – pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Jika hal ini dilakukan dengan taat asas, tentu dalam prosesnya pembangunan ekonomi tidak akan menemukan hambatan secara berarti. Dengan kata lain,

pendidikan tinggi akan mampu mengurangi masalah yang akan dihadapi dalam pembangunan. Jika masalah utamanya adalah tingginya angka pengangguran, maka seharusnya maraknya perguruan tinggi selaku pelaksana penyelenggaraan pendidikan tinggi minimal bisa menurunkannya.

Berdasarkan pola pikir seperti itu, jika pengangguran terus meningkat sejalan dengan berkembangnya perguruan tinggi, tentu hal ini menarik untuk dikaji. Apa arti penting pengembangan pendidikan tinggi dalam mengarungi era globalisasi ? Mengapa ditengah perguruan tinggi yang sangat marak terdapat pengangguran yang semakin meningkat ? Apa masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan tinggi kita ? Bagaimana seharusnya perguruan tinggi berkiprah dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya ? Itu semua adalah serentetan masalah yang hendak dikaji dalam makalah singkat ini.

Arti Penting Pendidikan Tinggi Dalam Mengarungi Era Ekonomi Global

Di dalam mengarungi era ekonomi global, suatu negara yang memiliki sumberdaya manusia berpengetahuan tinggi hampir dapat dipastikan akan unggul dalam berkompetisi dengan negara lain. Era ekonomi global yang ditandai oleh menguatnya ekonomi neoliberal, tidak lagi menempatkan pemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara kuantitas sebagai unggulan, tetapi lebih menekankan pada aspek kualitasnya. Dengan kata lain, keunggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kunci sukses suatu negara dalam mencapai keberhasilan pembangunannya.

Era ekonomi global telah mengingatkan kembali negara berkembang untuk tidak terlalu “takabur” dengan kekayaan sumberdaya alam dan banyaknya sumberdaya manusia. Jika kepemilikan tersebut tidak mempunyai nilai kompetitif. Disebut mengingatkan kembali karena sesungguhnya hal itu sudah tampak jelas sejak dunia belahan Utara unggul dari negara-negara di dunia belahan selatan. Hampir seluruh negara subur yang kaya akan sumberdaya alam di belahan selatan ternyata dalam perkembangannya tersudutkan pada predikat negara sedang berkembang. Sebaliknya, negara di dunia belahan utara – yang dikatagorikan miskin sumberdaya alam, sebagian tergolong negara maju.

Kerangka pikir yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai penggerak mesin ekonomi tersebut dengan sendirinya menempatkan

lembaga pendidikan tinggi sebagai *center of excellence* pada posisi yang sangat penting dan strategis. Dalam arti kata logis, pendidikan memberi sumbangan dalam menyediakan tenaga kerja berpengetahuan, berketerampilan, dan menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Bahwa pengetahuan umum bisa meningkatkan produktivitas sudah banyak dikemukakan oleh pakar ekonomi pembangunan. John Stuart Mills (Mills dalam Sadono, 1985 : 279-280 dan dalam Jhingan, 1992: 134) menekankan hal itu dilihat dari efisiensi yang bisa dihasilkan oleh mereka yang berpendidikan umum. Pengetahuan umum bisa meningkatkan efisiensi atas tidak dilakukannya kegiatan tidak produktif karena meningkatnya kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat tahayul dan mistik dalam kegiatan ekonomi. Dengan pengetahuan yang bertambah, orang tidak lagi memandang perlu untuk menanam kepala kerbau pada saat dia akan mendirikan kios rokok, misalnya.

Selanjutnya dalam hal keterampilan, Mills menyatakan bahwa pendidikan kejuruan akan dapat meningkatkan produktivitas dari adanya kenaikan keterampilan. Bahwa penguasaan teknologi akan dapat meningkatkan produktivitas sudah terlontar dari pandangan sang bapak ekonomi pada saat mengutarakan arti penting "*Division of Labour*". Penguasaan teknologi bukan saja digunakan untuk bertahan dari ketatnya persaingan (Smith, dalam Sadono : 1985:275), tetapi juga bisa meningkatkan produktivitas seperti teori "*Vent for Surplus*" dan teori "*productivity*" dengan pendekatan "*production Possibility Frontier*" yang membesar karena kemajuan teknologi. Dengan demikian keberhasilan Pendidikan Tinggi akan berpengaruh terhadap sukses pembangunan ekonomi, yang berimplikasi langsung pada kemajuan bangsa secara keseluruhan (Amich Alhumami dalam Kompas, 2004:6).

Sebagai kebalikannya dari sisi lain Todaro (1994:38) memandang bahwa tingkat kehidupan dan produktivitas yang rendah merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang satu sama lain saling mengkait dan merupakan manifestasi serta penyebab utama keterbelakangan di negara-negara Dunia ketiga. Teori terkenal sebagai ciptaan Gunnar Myrdal ini membahas tentang "*Circular and Cumulative Causation*" di negara berkembang didasarkan interaksi antara tingkat hidup dan produktivitas yang rendah.

Pendidikan Tinggi diharapkan akan dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan inovatif. Harapan lain dari adanya Pendidikan Tinggi adalah temuan-temuan ilmiah dan teknologi yang bisa disebar-luaskan ke tengah masyarakat. Hasil pendidikan tinggi bukan hanya berupa tenaga kerja yang terampil tetapi juga inovatif. Bukan saja mereka yang siap untuk menjadi buruh tetapi pencipta kesempatan kerja. Banyaknya temuan akan melahirkan banyaknya kegiatan. Banyaknya kegiatan akan mengakibatkan luasnya kesempatan kerja. Jadi makin banyak perguruan tinggi, berarti makin banyak sarjana, dan makin banyak temuan baru sehingga makin luas kesempatan kerja.

Harapan terhadap pendidikan tinggi seperti apa yang dikemukakan tadi adalah sangat beralasan. Jangankan pendidikan tinggi, segala bentuk pendidikan akan mampu menyentuh nalar kognitif, affektif, dan psikomotorik, para peserta didik. Makin tinggi tingkatannya, pendidikan akan mampu memberi kontribusi, signifikan pada peserta didik yang dengan akselerasinya bisa memberi kontribusi kepada pembangunan ekonomi. Dengan terciptanya pengetahuan, ditemukannya teknologi baru, berkembangnya seni yang disebarluaskan ke tengah masyarakat, maka banyak hal bisa menjadi nilai tambah dalam menggerakkan roda pembangunan. Peserta didik yang telah berubah cara berpikir, cara bertindak, dan kultur bekerjanya akan berakselerasi dengan kemampuan trasformatifnya di tengah masyarakat luas sehingga mampu memacu pembangunan ekonomi.

Dalam bentuknya, pendidikan tinggi akan mampu melahirkan pembaharu. Pembaharu yang membawa ide baru berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (*Science, Art, and Technology*) dari perguruan tinggi ke tengah masyarakat. Para pembaharu ini adalah penyebar luas ide-ide pembaharuan yang akan mampu melahirkan wirausahawan inovatif yang tangguh. Para wirausahawan tangguh dengan kualifikasi (Schumpeter dalam Sadono, 1989:282) :

- (1) selalu dinamis dalam memperkenalkan suatu barang baru
- (2) selau dinamis, dalam menggunakan cara baru dalam memproduksi suatu barang.
- (3) selalu dinamis dalam memperluas pasar sesuatu barang ke daerah-daerah yang baru.
- (4) selalu dinamis dalam mengembangkan sumber bahan mentah yang baru atau

- (5) selalu dinamis dalam mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri

Dihubungkan dengan aspek pertumbuhan ekonomi, berkembangnya wirausaha inovatif yang tangguh ekonomi. Pesatnya laju pertumbuhan dengan cara demikian akan membawa keberhasilan pembangunan. Cara yang dimaksud adalah suatu cara dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan teknologi terapan (*adaptive technology*) sehingga terjalin keterikatan (*Linkage*) yang sangat kuat antara industri hulu (*upstream industries*) dan hilir (*Down stream industries*) dan atau antara sektor di belakang (*backward linkage*) dan di muka (*foreward linkage*). Cara tersebut hanya akan terjamin jika perguruan tinggi menjalankan kegiatan pendidikan tinggi secara taat asas.

Mengapa dalam perkembangannya di negara kita saat ini perguruan tinggi yang sangat marak diikuti oleh pengangguran yang semakin meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya ?

Masalah pengangguran

Di negara kita, sejak dua dekade yang lalu terdapat gambaran tentang maraknya lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ironisnya, sejak dua dekade itu pula pengangguran bertambah banyak.

Sebagai gambaran, di Jawa Barat saja terdapat lebih dari 380 buah lembaga yang menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan tinggi, 374 buah diantaranya adalah swasta.

Berkembangnya swasta untuk turut berkiprah di dalam mengembangkan pendidikan memberikan gambaran betapa membaiknya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, khususnya arti penting pendidikan tinggi. Itu sisi positifnya. Bagaimana jika pendidikan tinggi adalah pelarian dari sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bagaimana pula jika ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi lebih utama sebagai pengukuhan paham feodal dalam gaya baru ? Ini perlu penelitian tersendiri yang dalam konteksnya tidak mungkin dibahas di sini. Pembahasan di sini lebih ditekankan pada aspek penawaran kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dan pada aspek ini tampaknya sampai sejauh ini sarat dengan berbagai permasalahan.

Sesungguhnya pengangguran di Indonesia bukanlah masalah baru. Sejak sebelum merdeka pengangguran ini sudah ada di tengah masyarakat. Jika sekarang dipermasalahakan adalah karena kondisinya yang sangat ironis. Jika terjadinya pengangguran pada zaman penjajahan dahulu dianggap wajar, kini pada saat perguruan tinggi sudah demikian banyak makin berkembangnya pengangguran adalah hal yang luar biasa.

Dalam seminar Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan Bank Dunia Perwakilan Indonesia bekerja sama dengan CSIS (*Center for Strategic and Internasional Studies*) di Jakarta, terungkap adanya pernyataan bahwa angka pengangguran akan terus meningkat. Pada tahun 2005 akan menjadi minimal lima persen (dari angkatan kerja), dan minimal delapan persen di tahun 2020. Tahun 1990, angkanya masih sekitar tiga persen (Ananta, dalam Kompas, Selasa, 13/8/1997). Jika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan 254 juta jiwa, maka jumlah orang menganggur ini mencapai di atas 20,3 juta orang, meningkat tajam dari tahun 1990 yang baru sekitar 5,37 juta orang, dan dua kali lipat pada tahun 2005 yang di atas 11,15 juta orang. Pada tahun 2005 tersebut, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 223 juta jiwa, meningkat dari tahun 1990 yang 179 juta jiwa.

Berbicara mengenai pengangguran di Indonesia, maka yang dimaksud adalah pengangguran terbuka, dan belum meliputi mereka yang termasuk dalam pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) atau setengah pengangguran yang angkanya selama ini jauh lebih besar dibandingkan angka pengangguran terbuka

Jika kita tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam mengarungi era ekonomi global, maka bisa dipastikan angka pertumbuhan jumlah orang yang bekerja akan menurun makin tajam pada tahun 2000 – 2005 dan tahun 2015-2020. Dihadapkan pada perkembangan jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah, turunnya jumlah orang yang bekerja akan memperbesar angka pengangguran.

Tabel
Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia Kerja
2000 s.d. 2004 (Dalam Jiwa)

Umur	2000	2001	2002	2003	2004
15-24	43.406,6	43.768,7	43.833,1	43.846,6	43.806,9
25-39	48.326,2	49,164,5	50.134,1	51.136,4	52.096,5
40-54	32.312,7	33,578,6	34.901,6	36,158,3	373.19,5
55-59	6,654,1	6,821,2	7.031,6	7.245,9	7.456,9
Jumlah	130.699,6	133,333,0	135.900,4	138.364,2	140.679,8

Source: Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan 2000

Penduduk usia kerja yang bertambah dari 130.699.600 orang pada tahun 2000 menjadi 140.679.800 orang pada tahun ini dan 142.888.900 orang pada tahun 2004 tentunya membawa konsekuensi pada jumlah pencari kerja yang bertambah besar. Menghadapi era ekonomi global, tanpa daya tarik yang memadai lagi bagi investor, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan prasarana serta supra sarananya akan membawa akibat pada meningkatnya angka pengangguran. Hal ini dimungkinkan karena (1) berkurangnya jumlah industri dan (2) meningkatnya penggunaan teknologi maju yang tidak diimbangi oleh kemampuan adaptasi masyarakat.

Dihubungkan dengan maraknya perkembangan perguruan tinggi, meningkatnya angka pengangguran mencerminkan tidak efektifnya pendidikan tinggi dalam membuka kesempatan kerja. Mengapa demikian dan apa masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi kita ?

Masalah Anggaran Pendidikan

Diantara sekian banyak masalah yang dihadapi pendidikan tinggi di negara kita, agaknya puncaknya mengerucut pada masalah yang menyangkut anggaran pendidikan. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius adalah masalah anggaran untuk mendapatkan pendidikan dan anggaran untuk melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Secara mikro, seorang peserta didik harus mengeluarkan anggaran untuk bisa mendapatkan pendidikan. Anggaran yang harus disediakan untuk mendapatkan pendidikan tinggi antara lain adalah Sumbangan Pengembangan Pendidikan & Praktikum, Sumbangan Pengembangan

Kampus, Iuran Mahasiswa Baru, dana Orientasi Pengenalan Mahasiswa Baru, iuran Partisipasi Orang Tua. Mahasiswa dan berbagai bentuk pembayaran untuk keperluan pelengkap persyaratan administratif. Di suatu perguruan tinggi negeri non BHMN untuk mahasiswa regular lulusan SPMB bersamanya “tarif” pendidikan ini lebih dari Rp 3,4 juta. Bagi yang tidak lulus SPMB masuk jalur “paralel” jika bersedia membayar sampai Rp 11 juta, atau masuk melalui tes lagi untuk program D3, atau program ekstensi, atau ... banyak lagi program yang ditawarkan, bahkan untuk program Magister yang eksekutif sampai pada angka Rp 80 juta dengan memberi tambahan informasi belum uang buku. Pengeluaran tersebut tentu saja belum termasuk uang pemondokan jika peserta didik harus kost, uang saku, uang buku, dan berbagai pengeluaran lainnya.

Secara makro, penyelenggaraan pendidikan termasuk salah satu bentuk pembangunan manusia yang oleh Rossenstein – Rodan dalam Jhingan (1992 : 231) dikatakan Produk Marjinal *Sosial Overhead Capital* (Sadono : 176). Dinyatakan sebagai pembangunan manusia karena keberhasilannya akan merupakan salah satu komponen dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDR (*Human Development Index*). Sama dengan anggaran untuk pembangunan manusia lainnya, pengeluaran untuk pendidikan ini memerlukan anggaran yang besar. Dari mulai membangun sistem sampai dengan membangun kampus lengkap dengan sarannya membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Pengeluaran untuk pengembangan pendidikan ini dianggarkan oleh negara yang di Indonesia termasuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Negara berkembang biasanya tidak mampu dan tidak mau memahami arti pengembangan pendidikan. Hal ini bisa dimaklumi, karena sifatnya yang “*Reductio and absurdum*”. Untuk mengembangkan pendidikan hasilnya tidak kelihatan sedangkan yang pasti adalah keluarnya anggaran besar. Tetapi orang harus yakin bahwa pengembangan pendidikan saat ini akan menjamin keberhasilan pada masa mendatang. Untuk hal ini bisa diambil perbandingan pengalaman pembangunan pendidikan kita dengan negara yang sekarang termasuk negara-negara industri baru (NIC’s) dan pengalaman negara-negara OECD (*Organistion for Economic Co-operation and Development*).

Sebagai gambaran mengenai anggaran pendidikan, sejak dulu Indonesia tidak pernah menempatkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunannya. Pada Pelita I anggaran pendidikan adalah

sebesar 5,13 % saja dari APBN. Kalaupun ada peningkatan pada Pelita II menjadi 5,74 % dari APBN atau pada Pelita III sebesar 6,16 % dari APBN, tetapi porsinya sangat jauh dari memadai untuk meningkatkan Mutu Modal Manusia (pinjam istilah Aris Ananta) apalagi kemudian pada Pelita IV kembali menurun menjadi 5,17 % dari APBN. Sebagai perbandingan, periode yang sama pengembangan pendidikan yang dianggarkan oleh Pemerintah Korea Selatan adalah sebesar 20,5 % dari APBNnya, Taiwan sebesar 18,0 % dari APBN dan Singapore adalah 21,6 % dari APBNnya. Dari perbandingan itu apa yang bisa dihasilkan saat ini ? Negara yang pada saat awal pembangunannya mengembangkan pendidikan dengan anggaran yang memadai, sekarang sudah bisa memetik hasilnya dan berhak menyandang predikat *New Industrial Countries*. Negara yang memiliki masyarakat industrial masyarakat yang berpandangan jauh ke depan.

Gambaran lain bahwa kontribusi pendidikan terhadap pembangunan itu amat nyata, diperlihatkan oleh adanya korelasi positif antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, selama kurun waktu 1920-an sampai 1990-an, pembangunan pendidikan di AS telah memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 14 %. Bila *advances in knowledge* yang relevan dengan proses produksi dikoversi secara ekonomi, sumbangannya meningkat berkali lipat mencapai 42 % (Denison, 1985 dalam Amich Alhumami, Kompas, 2004: 42).

Dilihat dari rendahnya jumlah anggaran untuk pendidikan tersebut, bisa dibenarkan jika banyak orang berpendapat bahwa Orde Baru lebih menekankan pada pengembangan ekonomi ketimbang pembangunan manusia. Bisa dibenarkan jika yang dimaksud pemerintahan saat itu lebih mengutamakan pembangunan fisik.

Sekedar meluruskan, pembangunan ekonomi sesungguhnya tidak mengabaikan proses pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita riil secara berlanjut dalam arti berkesinambungan dalam jangka panjang. Jadi, dalam pembangunan ekonomi ada investasi fisik dan ada investasi sumber daya manusia. Bahkan ekonomi sejak awal telah menggarisbawahi arti penting tercapainya kesejahteraan bangsa (*The Wealth of Nation*) dan untuk tercapainya tujuan pembangunan itu. Pembangunan manusia diutamakan. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia adalah dengan mengembangkan pendidikan sehingga bisa terpendang di mata internasional.

Sistem pendidikan diatur dalam UU No. 2 dan khusus untuk pendidikan tinggi diatur melalui PP 60 dan lebih khusus lagi mengenai PTN diatur dalam PP 61. Di dalam sistem pendidikan tinggi terdapat nada yang mendua. Di satu pihak ada nada yang menyuarakan kemampuan berlebih dari negara sehingga peran serta swasta dalam mengembangkan pendidikan tinggi diberi subsidi. Di lain pihak, keluarnya PP 61 menandakan kurangnya kemampuan negara untuk memberi subsidi yang memadai bagi PTN.

Berawal dari kurangnya kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pendidikan secara lebih memadai, maka otonomi PTN dan BHMN mulai mewarnai iklim pendidikan tinggi yang bertambah kelabu. Disebut bertambah kelabu karena asas kemitraan antara PTN dan PTS yang sejak dini dirasakan tidak terwujud dalam implementasi bahkan menjadi makin ternodai oleh bertambah tingginya derajat persaingan antara PTN dan PTS. Kemitraan yang dalam salah satu bentuknya adalah kerjasama PTN dan PTS dalam hal “berbagi segmen pasar”, menjadi makin dipertanyakan realisasinya dengan keluarnya otonomi PTN maupun BHMN. Otonomi PTN sebagai bentuk apologis dari pemerintah atas kurang memadainya subsidi pendidikan dalam melahirkan tiga bentuk kebijakan : (1) Menaikan SPP, (2) mengembangkan program studi dalam arti memperbanyak jumlah program studi dan memperbesar daya tampung, dan yang (ketiga) kedua-duanya; yang memperbanyak program studi dan sekaligus meningkatkan SPP. Apa yang dirasakan oleh masyarakat ? Neoliberalisme dalam bidang pendidikan. Pendidikan telah kehilangan naluri. Komersialisasi pendidikan. Pendidikan tidak memberi kesempatan kepada si miskin, dan banyak lagi nada yang menempatkan pendidikan tinggi terperangkap ke dalam aura bisnis.

Menaikan SPP menimbulkan jeritan di kalangan si miskin, PTN dianggap tidak lagi beda dengan PTS. Bahkan ada PTN yang memasang “tarif” lebih mahal ketimbang PTS. Meski dalam hal kemitraan, kebijakan ini tidak terlalu “mengganggu”, tetapi cukup mengganggu asas keadilan dalam bentuk hilangnya kesempatan masyarakat miskin untuk mendapatkan kesempatan berpendidikan tinggi.

Mengembangkan program studi jelas membuka *front* dengan PTS sehingga sangat mengganggu asas kemitraan. Kebijakan membuka program dan memperbesar kapasitas daya tampung jelas menciptakan persaingan tidak sehat dalam bidang pendidikan, meski untuk membuka program tersebut PTN “terpaksa” menggunakan dosen PTS yang masih berpangkat asisten. Satu hal yang sudah pasti, sebagai contoh di Jawa Barat dari Survei

Aptisi pada tahun 2003 sudah ada 50 PTS yang kolaps akibat tidak mendapat mahasiswa baru (PR. 2003). Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu dampak kebijakan yang bertentangan dengan kebijaksanaan kemitraan. Jumlah PTS se-Jabar pada tahun 2003 mencapai 374 buah. PTS besar “hanya” 68 buah seperti Unisba, Unpas, Unpar, Unwim, Unsil, dan lain-lain. Sedangkan sisanya 306 PTS adalah kelas menengah bawah yang jumlah mahasiswanya di bawah 500 orang. Malah tak sedikit PTS yang jumlah mahasiswanya di bawah 200 orang. Dengan kebijakan PTN yang menerima mahasiswa non-SPMB dan berbagai kelas ekstensi, hal ini jelas akan mengganggu asas kemitraan karena bisa membuat PTS “Gulung Tikar”. Dari Survei yang dilakukan Aptisi, dari lima faktor yang menyebabkan penurunan minat lulusan SLTA melanjutkan ke PTS, pengaruh terbesar sampai 30 % disebabkan langkah-langkah sejumlah PTN yang membuka pendaftaran non SPMB mulai dari kelas ekstensi, diploma, dan reguler sore. Kebijakan PTN-PTN yang menetapkan waktu ujian masuk berbeda-beda juga berpengaruh terhadap penurunan mahasiswa PTS.

Bagaimana seharusnya perguruan tinggi berkiprah dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya. ?

Problematika Perkembangan Pendidikan Tinggi

Di dalam masyarakat ekonomi, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah adalah tiga pelaku yang bisa membangun sinergi dengan baik. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan tinggi adalah penghasil faktor produksi terutama tenaga kerja yang akan digunakan oleh institusi industri. Sebaliknya institusi industri yang menjalankan fungsi produksi barang dan jasa adalah pengguna hasil pendidikan tinggi dari perguruan tinggi. Keterkaitan ini tentu saja direkat oleh sistem dengan pemerintah selaku perekat yang menciptakan iklim kondusif terhadapnya. Dengan kata lain; Pemerintah cq Depdiknas dan departemen terkait secara *integrative* berfungsi untuk menciptakan iklim kondusif agar pendidikan tinggi berjalan pada “rel”nya. Pemerintah tidak perlu membagi subsidi berlebihan kepada PTS. Kopertis dan dosen kopertis di”tawar”kan saja kepada PTS yang sudah mapan sehingga anggaran pendidikan bisa bertambah besar dan PTN tidak perlu dibebani banyak pekerjaan tentang mencari anggaran. Perguruan Tinggi wajib melaksanakan pendidikan tinggi bekerjasama dengan industri secara baik. Industri wajib

melaksanakan proses produksi bekerjasama dengan perguruan tinggi secara baik.

Sambil menunggu pemerintah membenahi aturan main dengan lebih bijak, ada baiknya swasta dan manajemen perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merubah budaya masyarakat tradisional yang “senang” akan kemudahan” menjadi budaya masyarakat industrialis yang “senang menghadapi tantangan” secara sederhana budaya tradisional dalam hal ini adalah budaya yang menggantungkan anggaran dari pemerintah dan atau peserta didik. Jika tantangan bisa kita rubah jadi peluang tinggal bagaimana masing-masing mengenal kekuatannya sendiri.

PTN tentu kuat akan aksesnya dengan pemerintah dan industrialis. PTS kuat akan kemudahannya dalam merekrut dan menggunakan tenaga dosen berpengalaman kerja di bidang industrial. Dengan kekuatannya masing-masing, masalah yang tercipta akibat kebijakan pemerintah kita abaikan dulu. Masing-masing bisa berbenah diri dengan lebih bermartabat. Apa bangganya berburu di kebun binatang dan lari lintang pukang pada saat di lepas di hutan ? Apa bangganya memancing di kolam dan berkeluh kesah pada saat di lepas di lautan luas ? Apa yang bisa dibanggakan jika manajemen perguruan tinggi bisa mengembangkan program studi dengan menopang pada kucuran subsidi pemerintah dan atau SPP dari peserta didik? Akan sangat bermartabat jika pengembangan program adalah hasil sebuah inovasi yang lahir dari jalinan kerjasama dengan para pengguna hasil pendidikan tinggi.

Sudah saatnya kita hargai martabat ketimbang hasil pemberian atau bahkan korupsi. Perguruan tinggi harus mulai menjadi contoh mengingatkan kembali urutan agenda reformasi, yakni :

1. Pengikisan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Koncoisme
2. Melaksanakan asas profesionalisme
3. Desentralisasi pengolahan pendidikan dan isi kurikulum
4. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun
5. Peningkatan mutu sekolah menengah umum dan kejuruan
6. Peningkatan mutu dan otonomi pendidikan tinggi
7. Pengembangan pendidikan *alternative*
8. Peningkatan mutu profesi guru
9. Pembiayaan pendidikan yang demokratis

10. Peraturan dan perundang-undangan

11. Pemberdayaan mahasiswa

Dengan mengingat agenda reformasi tersebut mudah-mudahan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini dirangkum oleh menteri tenaga kerja ketika memberi sambutan pada peringatan 40 tahun Unand bulan september 1996 bisa diperbaiki. Jika pada saat itu setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan 135.000 – 150.000 sarjana baru, sementara yang tertampung adalah 40.000 – 65.000 orang saja, maka ke depan hal ini bisa diperbaiki. Jika pada saat itu terdapat kondisi ironis, sementara masih banyak sarjana menganggur terdapat 60.000 tenaga kerja luar negeri (Tilaar, 1997: 181), maka ke depan hal ini bisa diperbaiki. Untuk memperbaikinya, dalam era globalisasi, pendidikan tinggi di Indonesia harus mampu merespon dan mengantisipasi perkembangan ekonomi global. Selaku fasilitator, sudah pada tempatnya jika pemerintah memberdayakan perguruan tinggi agar pendidikan tinggi dijalankan dengan benar dan baik sehingga perguruan tinggi berfungsi sebagaimana mestinya.

Penutup dan Rekomendasi

Dijalankannya pendidikan tinggi dengan baik dan benar adalah baik dan benarnya perguruan tinggi melaksanakan tri dharma nya, mulai dari proses pembelajaran pada dharma pendidikan, pelaksanaan penelitiannya sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya.

Pada proses pembelajaran, kurikulum adalah masalah utama yang harus digaribawahi. Kurikulum harus bisa mengarahkan pada peserta didik untuk mempunyai *self learning spirit*, mulai dari spirit untuk belajar mengenal (*learning to know*), belajar mengerjakan (*learning to do*), belajar hidup di tengah masyarakat (*learning to life together*), belajar menjadi seseorang (*learning to be*) (Delors dalam Waras Kamdi 2004). Di dalam proses pembelajaran ini seorang mahasiswa dibentuk menjadi orang yang memiliki kompetensi tinggi dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat setelah menimba pengetahuan dari bangku kuliahnya.

Pada tataran ini, perguruan tinggi sebaiknya juga di”merdeka”kan bersaing dengan perguruan tinggi lain dalam menjalankan fungsinya memberikan pendidikan tinggi kepada para mahasiswanya. Asumsikan saja dua hal: (pertama) masyarakat calon peserta didik sudah dewasa dalam menentukan perguruan tinggi pilihannya, (kedua) penyelenggara pendidikan

tinggi sudah memahami fungsinya. Dengan kata lain, pemerintah hanya berfungsi memberikan fasilitas dan menciptakan iklim kondusif guna terciptanya persaingan sehat antar perguruan tinggi. Dalam hal ini pemberian peringkat dalam akreditasi rasanya perlu ditinjau ulang. Akreditasi dikembalikan pada fungsinya bukan untuk penunjang promosi menjerat mahasiswa baru berupa pemberian daya tarik minat calon mahasiswa tetapi hanya sarana konsultatif dalam pengelolaan perguruan tinggi saja. Sebagai contoh, dalam menghadapi masalah pengangguran yang semakin marak dan mengantisipasi hal-hal yang akan dihadapi dalam ekonomi global, di dalam pengembangan kurikulum diberikan sarana penekanan pada upaya melahirkan program penelusuran minat dan bakat sehingga arahan melahirkan wirausahawan bisa menggantikan orientasi kekalnya feodalisme gaya baru.

Persaingan sehat antar perguruan tinggi juga menuntut kesetaraan. Pada tataran ini PP 61 Otonomi PTN dan BHMN agaknya perlu ditinjau ulang. Sementara image PTN masih superior di mata masyarakat, Otonomi dan BHMN yang untuk banyak PTN dimanfaatkan dengan mendirikan program studi berakibat pada disharmonisasinya hubungan kemitraan PTN-PTS. PTN yang mestinya membina PTS berakhir dengan anecdote PTN membina-sakaan PTS.

Pada tataran kedua, perguruan tinggi sebaiknya juga di”merdeka”kan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam menjalankan fungsinya menghasilkan *intellectual properties* dan menyelenggarakan penelitiannya. Memberi kesempatan luas kepada para mahasiswanya untuk berlatih melaksanakan penelitian dasar dan menghasilkan karya tulis yang *publishable*. Memberi kesempatan luas kepada para dosen dan penelitiannya untuk melaksanakan penelitian terapan (*Applied research*) dan menghasilkan karya tulis dan hasil penelitian yang *applicable*.

Lebih lanjut guna tepatnya materi dalam proses pembelajaran sekaligus mempercepat proses alih teknologi perlu dibuat program kerjasama antara industri sebagai pengguna dan perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja.

Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, kerja sama antara Perguruan Tinggi dan industri sangat diperlukan. Bentuknya bisa berupa (1) pelatihan karyawan pada institusi pemerintah dan industri (2) program magang bagi mahasiswa dan dosen pada institusi pemerintah dan industri

yang sangat berarti untuk memberi bekal pengalaman kerja dan mengaplikasikan pengetahuan pada dunia nyata.

Dengan hilangnya aura bisnis, semoga pendidikan tinggi bisa dijalankan dengan benar oleh perguruan tinggi sehingga efektivitasnya bisa dirasakan masyarakat berupa mengecilnya angka pengangguran semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. 2004. "Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi". *Harian Kompas*. 06-08-2004.
- Ananta, Aris dan Sugiharso, 1993. "Penawaran Pekerja : Suatu Aspek Perencanaan Tenaga Kerja". *Makalah* disampaikan di Seminar Sehari Tentang Keluarga, Pekerja dan Perekonomian, LD-FE-UI dan PAU – Ekonomi, Kampus UI, Depok, 15 April 1993.
- Ananta, Aris. 1993. "Investasi Sumberdaya Manusia". *Makalah* disampaikan di Seminar Sehari Ekonomi, kampus UI Depok, 15 April 1993.
- , dalam *Kompas*, 1997. "Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia". Seminar Sehari Diselenggarakan Bank Dunia Perwakilan Indonesia Bekerjasama dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies) di Jakarta 13 Agustus 1997.
- AR, Karseno. 1995. "Sumbangan Produktivitas Faktor pada Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur" 1977. 1992. *Makalah* pada Seminar Produktivitas UGM.
- Booth, Anne, 2000 *The Indonesian Economy in The Nineteenth and Twentieth Centuries*. London : Mc. Millan.
- Makinda, Samuel. 2000. Globalization as A Policy Outcome, *Affairs*, Vol.74. No. 6 April – Mei
- Mardi, Zaenal & Marulak Malau. 1997. *Perekonomian Indonesia : Ciri Dasar. Pola & Arah Perubahan*. Masalah Utama Bandung.
- M.L, Jhingan. terj. D. Guritno. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Jakarta : Rajawali.
- Passay, N. Haidy A. dkk. 1993 "Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi". *Makalah* disampaikan di Seminar Sehari Tentang Keluarga, Pekerja dan Perekonomian. LD-FE UI dan PAU – Ekonomi, Kampus UI, Depok, 15 April.
- S.J, Sudarminta 1998. Pendidikan Masa Depan : Problematika dan Prospeknya Dalam *Kompas* 2 Mei 1998.

- Sudaryanto, Cacuk. 1998. "Pengembangan Strategi Industri Indonesia". *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Terbatas Dewan Riset Nasional, 10 Maret 1998.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan* Jakarta. LP. FE-UI.
- Tambunan, Tulus, TH. 2003. *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tillaar, H.A.R. 1997. *Pengembangan SDM dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- , 1998. *Beberapa Agenda Reformas Pendidikan Nasional Dalam Peprspektif Abad 21* Magelang : Tera Indonesia.
- Todaro, Michael P. 1994. Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah dan Haris Munandar. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga..
- Toenililoe, AJE. 2004. "Sekolah dan Mobilitas Sosial". *Kompas* 06-08-2004.
- Waras Kamdi. 2004. "Geliat Ber KBK di Perguruan Tinggi", *Harian Kompas*, 06-08-2004